

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM  
PENDIDIKAN KESETARAAN  
Studi Kasus: Program Pendidikan Paket B Desa Cermin Alam, Kecamatan VII  
Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi.**

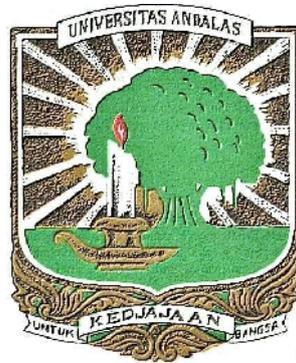
**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Antropologi Pada  
fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Oleh**

**RIA WENNY ASRIANI**

**05192045**



**JURUSAN ANTROPOLOGI SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

2011

ABSTRAK

Ria Wenny Asriani. Bp 05192045. Jurusan antropologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas. Padang. 2011. Judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan. Pembimbing I Prof. Dr. Nursyirwan Effendi dan pembimbing II Dra. Yunarti M.Hum.

Penelitian dilakukan di program pendidikan paket B yang ada di Desa Cermin Alam, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Program pendidikan paket B ini dirintis sejak tahun 2008.

Desa Cermin Alam tidak memiliki sekolah formal, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tebo mengupayakan satu program yang dapat membantu masyarakat yang putus sekolah untuk bisa kembali bersekolah walaupun usia mereka sudah tidak termasuk ke dalam usia sekolah lagi. Partisipasi masyarakat menjadi penting agar program bisa berjalan dengan baik dan keinginan masyarakat untuk bisa memperbaiki kehidupan mereka dapat terwujud.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan gambaran program pendidikan kesetaraan dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program pendidikan kesetaraan ini.

Masyarakat yang menjadi warga belajar Program Pendidikan Paket B cukup banyak, akan tetapi tingkat kehadiran disetiap pertemuan belajar sangat rendah. Modul yang diberikan kepada peserta didik pun tidak semua peserta didik membacanya. Yang menjadi alasan utama dari tingkat kehadiran yang rendah adalah, mereka lebih memilih menghabiskan waktu untuk bekerja walaupun mereka sendiri sangat membutuhkan program pendidikan paket B ini. Selain itu ada beberapa dari peserta didik yang ikut Program Pendidikan Paket B hanya untuk mendapatkan ijazah saja, bukan mencari ilmu pengetahuan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Di masa yang akan datang, masyarakat kita jelas akan menghadapi banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan sebelumnya, kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi. Satu hal yang tidak mungkin dihindari adalah kegiatan pembangunan nasional akan semakin terkait erat dengan perkembangan internasional. Salah satu bentuk upaya pembangunan nasional adalah dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat Indonesia agar dapat menghadapi perubahan. Masih banyaknya warga yang tidak melanjutkan pendidikan ke taraf yang memungkinkan mereka menggeluti profesi tertentu, menuntut upaya-upaya untuk membantu mereka dalam mewujudkan potensi yang dimilikinya agar dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa (Abu, 1973).

Darsono (2008:51) dalam Jurnal *Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan* mengatakan bahwa Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia guna memenuhi kebutuhan rohani dan daya nalarnya yang setara dengan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya guna memenuhi kebutuhan fisik dan mental sosialnya. Oleh karena itu, kebutuhan rohani dan kebutuhan fisik merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi, sehingga sulit dan mahalnya harga pendidikan harus dipenuhi oleh negara dalam mencukupi kebutuhan dasar warganegaranya. Oleh karena itu, bila dewasa ini masih ada masyarakat yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya terutama wajib belajar sembilan tahun adalah negara selaku pemegang otoritas seharusnya memfasilitasi kemudahan warganegaranya untuk memperoleh pendidikan. Pelaksanaan

pendidikan itu sendiri telah di cantumkan dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 yang isinya “... mencerdaskan kehidupan bangsa... “ selain itu tercantum juga dalam pasal 31 Ayat 1 dan 2. Ayat (1) berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran“ dan Ayat (2) “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam undang-undang”.

Pendidikan sendiri sangat dibutuhkan untuk dapat mewujudkan masyarakat yang berpendidikan dan terampil serta berperan serta dalam kemajuan pembangunan. Selain itu pendidikan dapat membawa masyarakat tersebut menuju ke taraf ekonomi yang lebih baik. Pendidikan akan membuka pintu untuk menuju ke dunia modern, karena hanya dengan pendidikan dapat dilakukan perubahan sosial budaya, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan, penyesuaian nilai-nilai dan sikap-sikap yang mendukung pembangunan, dan penguasaan berbagai keterampilan dalam menggunakan teknologi maju untuk mempercepat proses pembangunan (Manan, 1989).

Namun, tidak semua masyarakat Indonesia dapat menikmati pendidikan dikarenakan di Indonesia masih banyak wilayah terpencil dan belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Padahal masyarakat miskin dan terpencil juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 dan 3 yang isinya ayat (1) “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Ayat (3) “ warga negara daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus”. Pemerintah wajib memenuhi hak tersebut seperti yang dicantumkan dalam pasal 11 ayat 1 yaitu pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negaranya.

Selain pembukaan UUD 1945, pasal 31 UUD 1945 dan UU no 20 tahun 2003, terdapat pula peraturan-peraturan lainnya mengenai pendidikan yaitu:

1. PP no 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar dalam pasal 1 disebutkan “pendidikan dasar merupakan pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan antara enam tahun di SD dan 3 tahun di SLTP. Pendidikan dasar diselenggarakan di jalur sekolah dan luarsekolah pada berbagai jenis dan bentuk satuan pendidikan.
2. PP no 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah.
3. Inpres no 1 tahun 1994 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar
4. keputusan Menko Kesra no 1 tahun 1991 tentang tim koordinasi wajib belajar pendidikan dasar.

Dalam pasal 34 ayat 2 undang-undang tentang pendidikan nasional menyebutkan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Namun itu tidak sepenuhnya dapat terlaksana, dikarenakan masih banyak wilayah di Indonesia yang kurang mendapatkan perhatian dalam difasilitasinya sarana pendidikan formal, karena letaknya yang jauh terpencil. sehingga masih banyak ditemukannya masyarakat putus sekolah di daerah tersebut Padahal pemerintah telah membuat kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun<sup>1</sup> yaitu suatu gerakan nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia tujuh s.d lima belas tahun untuk mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun sampai tamat.

---

<sup>1</sup> [www.gn-ota.or.id/aboutus/tanya.php](http://www.gn-ota.or.id/aboutus/tanya.php). *Pengertian* - GN-OTA Online. Diakses 22 Januari 2010.

Minimal masyarakat Indonesia menamatkan pendidikan sampai Sekolah Menengah pertama.

Tidak semua masyarakat bisa mengecap pendidikan dasar. Masyarakat ini pada umumnya sudah tidak memungkinkan lagi untuk bersekolah di sekolah formal, dikarenakan usia yang sudah lewat dari usia sekolah. Selain itu akses menuju sekolah formal yang minim dan letak sekolah formal yang jauh dari tempat tinggal mereka, sementara mereka termasuk dalam masyarakat miskin yang tidak mempunyai cukup biaya untuk transportasi menuju ke sekolah formal. selain itu permasalahan masyarakat putus sekolah ini muncul karena oleh mereka disadari atau tanpa disadari telah mengabaikan kebutuhan hak mereka akan pendidikan, karena adanya kebutuhan lain yang lebih penting untuk dipenuhi oleh mereka. Selain itu, kurangnya sarana pendidikan yang membuat mereka tidak dapat bersekolah. Oleh karena itu dibutuhkannya alternatif pendidikan lain yang setara dengan pendidikan formal. salah satunya adalah pendidikan kesetaraan. Ketentuan mengenai kesetaraan ini diatur dalam UU no. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26, ayat (6): “ hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu kepada Standar Pendidikan Nasional”.

Salah satu bentuk dari program pendidikan kesetaraan adalah program paket B setara SMP. Program ini didirikan sebagai sarana alternatif dalam upaya mengatasi masyarakat putus sekolah guna pertumbuhan dan pengembangan pendidikan serta keterampilan-keterampilan sosial, sehingga mereka dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang berpendidikan dan terampil serta berperan dalam kemajuan pembangunan. Dengan adanya usaha kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan-

pendidikan nonformal diharapkan dapat mencegah dan mengurangi masalah ketelantaran masyarakat agar tidak meluas.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan mengakibatkan semakin meningkatnya angka kemiskinan dan kebodohan. Berdasarkan data UNDP tentang *Human Development Index*(HDI) menunjukkan dari 174 negara, kualitas pendidikan Indonesia berada pada posisi kurang menggembirakan yakni peringkat 110, sementara negara Asean lainnya berada di atasnya, Japan berada di peringkat 11, Singapura berada peringkat 25, Korea berada pada peringkat 28 Brunei Darusalam peringkat 33, Malaysia peringkat 61, Thailand peringkat 73, Pilipina urutan 84, Cina pada peringkat 85, Vietnam di peringkat 108, Indonesia peringkat 110, Myanmar peringkat 129, Kambodja pada peringkat 130. (UNDP, 2005). Data Badan Pusat Statistik (BPS) memberi gambaran jumlah anak putus sekolah masih sangat besar dibandingkan mereka yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian tahun 2006-2007 data angka putus sekolah SD/MI adalah sebesar 30.63% sedangkan untuk SLTP dan MTS sebesar 32,45.

Tidak jarang masyarakat yang mengalami buta huruf sebagai konsekuensi dari kurangnya pendidikan bagi mereka. Untuk mengurangi masalah tersebut perlu adanya layanan pendidikan yang dapat menyentuh masyarakat hingga lapisan bawah, dimana pendidikan tidak hanya memusatkan pada jalur pendidikan formal saja, melainkan melalui jalur pendidikan lain yaitu pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Penyelenggaraan pendidikan non formal yang salah satunya adalah pendidikan kesetaraan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak mungkin terlayani pendidikannya di jalur pendidikan formal.

Program pendidikan paket B setara SMP mulai dirintis sejak tahun 1989, dan dilaksanakan secara nasional sejak tahun 1994. Jika dihitung sejak program ini mulai

dirintis seharusnya program ini telah terbebas dari berbagai permasalahan yang bersifat operasional, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan..

Program pendidikan kesetaraan ini diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma dan tidak memandang batas usia, sehingga mereka yang putus sekolah namun usia mereka sudah melewati usia sekolah atau sudah tidak termasuk dalam anak usia sekolah<sup>2</sup> lagi yaitu anak usia tujuh s.d lima belas tahun (termasuk anak cacat) yang menjadi sasaran program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga mereka dapat mengejar ketertinggalannya dan dapat meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial mereka. Namun, pengadaan program pendidikan kesetaraan ini belum tentu mendapatkan respon dan partisipasi yang baik dari masyarakat walaupun diberikan secara cuma-cuma dan juga tidak menutup kemungkinan masyarakat sangat antusias dengan adanya program pendidikan kesetaraan ini.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diyakini banyak pihak telah menjadi kata kunci dalam pengembangan pembangunan di era otonomi daerah sekarang ini. Partisipasi merupakan jembatan penghubung antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, kewenangan, dan kebijakan dengan masyarakat yang memiliki hak sipil, politik dan sosial ekonomi masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat, posisi tawar masyarakat di mata pemerintah menjadi meningkat, masyarakat tidak selalu di dikte dan didominasi oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan atau keputusan dalam pembangunan lingkungannya namun selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya. Konsep partisipasi merupakan suatu konsep yang luas, dan penting, karena salah satu indikator keberhasilan suatu pembangunan

---

<sup>2</sup> [www.gn-ota.or.id/aboutus/tanya.php](http://www.gn-ota.or.id/aboutus/tanya.php). *Pengertian - GN-OTA Online*. Diakses 22 Januari 2010.

adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program. Menurut Cohen dan Uphoff (1977:8) menyatakan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat penerima program pembangunan terdiri dari :

- a. Pengambilan keputusan.
- b. Implementasi
- c. Pemanfaatan (*Benefits*)
- d. Evaluasi Program Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting, karena masyarakat dituntut untuk menentukan arah dan strategi pembangunan disesuaikan dengan sikap dan budaya masyarakat setempat. Partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan suatu proses dalam memilih alternatif yang diberikan oleh semua unsur masyarakat, lembaga-lembaga sosial dan lain-lain.(Siagian,1972: 108).

Partisipasi masyarakat dalam hal ini sangat dibutuhkan agar program pendidikan kesetaraan ini dapat berjalan dengan baik. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab moral untuk menyukseskan program ini. Tanggung jawab moral ini tidak semata-mata untuk pendidikan anaknya dan pendidikan mereka sendiri, tapi juga menyangkut tanggung jawab sebagai warga negara yang harus berpartisipasi dalam pembangunan.

Guna mencapai keseimbangan mutualitas pendidikan, partisipasi dalam pendidikan memang menjadi sangat diperlukan, terutama menopang keberhasilan pendidikan itu sendiri untuk memberikan penyadaran tentang perlunya penanaman sikap dan aspirasi peserta didik yang realistis untuk memahami dunia nyata. Dalam realitasnya, partisipasi masyarakat dalam pendidikan nasional masih terbatas pada keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti program yang di buat oleh pemerintah,

bukan merealisasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat itu sendiri, sementara itu tidak semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak terutama mereka yang berada di daerah terpencil dengan masyarakat yang perekonomiannya rendah.

Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting karena masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat. Tanpa kehadiran masyarakat program pembangunan serta proyek-proyek seperti program pendidikan paket B ini akan gagal. Alasan lainnya partisipasi masyarakat menjadi penting yaitu masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan. Sehingga tujuan dari program pembangunan tersebut dapat tercapai seiring dengan tujuan dan keinginan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Program pendidikan paket B yang diadakan di Desa Cermin Alam melakukan pertemuan belajar setiap 3 kali dalam seminggu. Kegiatan belajar mengajar ini dilakukan di SD yang ada di Desa Cermin Alam. Tetapi, jika sekolah tersebut sedang dipergunakan oleh siswa-siswa SD maka para tutor bersama dengan warga belajar mencari tempat lain yang bisa digunakan sebagai tempat untuk kegiatan belajar mengajar, biasanya mereka belajar di rumah-rumah warga ataupun di kantor desa dan tempat-tempat lain yang bisa dijadikan tempat untuk belajar.

Selain ilmu pengetahuan seperti yang diajarkan di sekolah formal, program pendidikan paket B juga memberikan ilmu keterampilan yang bisa digunakan masyarakat untuk meningkatkan penghasilan mata pencaharian mereka. Sehingga kehidupan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. program pendidikan paket B di Desa Cermin Alam memilih keterampilan mengokulasi karet sebagai mata pelajaran keterampilan yang diajarkan.

Tingkat kehadiran peserta didik masih sangat rendah, modul yang diberikan untuk belajar mandiri di rumah pun jarang mereka baca. Beberapa dari peserta didik mengikuti program pendidikan Paket B hanya untuk mendapatkan ijazah, bukan mencari ilmu pengetahuan. Hal ini juga menjadi penyebab dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Pendidikan Paket B di Desa Cermin Alam.

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dari program pendidikan paket B di Desa Cermin Alam, antara lain masyarakat masih beranggapan bahwa tanpa belajar

pun mereka bisa mencari uang, dan bersekolah hanya akan menghabiskan uang. Selain itu sarana dan prasarana yang kurang juga membuat para warga belajar tidak nyaman mengikuti program ini sehingga tingkat kehadirannya menjadi rendah.

Pemerintah sendiri sudah memberikan dukungan yang besar terhadap program pendidikan paket B ini dengan memberikan dana yang cukup besar yang bisa dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan program pendidikan Paket B di Desa Cermin Alam. Rasa tanggung jawab yang besar dari para tutor juga menjadi dukungan yang penting bagi pelaksanaan program Pendidikan Paket B. Para tutor sendiri tidak diberikan gaji untuk mengajar di Program Pendidikan Paket B. Hanya uang transportasi yang jumlahnya juga sangat kecil, namun para tutor tetap melaksanakan tugas mereka dengan baik di setiap pertemuan belajar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Padang : Jurusan Sosiologi UNAND.
- Ahmadi, Abu. 1973. *Sosiologi Pendidikan*. PT. Bina Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Chaplin, CP. 1993. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Pendidikan kesetaraan Mencerahkan Anak Bangsa*. Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah.
- Depdikbud. 1991. *Ensiklopedia Indonesia, edisi khusus*. Jakarta : PT. Ictiar Baru- Van Hoeve.
- Faisal, Saraphiah. 2007. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ivancevich, D. Gibson. 1994. *Organisasi Manajemen Perilaku*. Jakarta :Erlangga.
- J, William Goode. 1995. *Sosiologi Keluarga*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Jurnal Perempuan, “ *Perempuan dan anak di Wilayah Tertinggal*”, edisi 59, halaman 51, Mei 2008.
- Kaswardi. 1998. *Mandat Masyarakat yang Dijalankan oleh Sistem Sekolah*. Jakarta : Rieneka Cipta.
- Koentjaraningrat. 1981. *Sejarah Teori Antropologi Budaya II*. Jakarta : UI-Press.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 1997. *Kebudayaan dan Mentalitas Pembangunan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Leavit, J. Harold. 1986. *Psikologi Manajemen*. Jakarta : Erlangga.
- Manan, Imran. 1989. *Dasar-dasar Sosial Budaya Pendidikan*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Masrial. 1996. *Teras Belajar Mengajar*. Padang : Angkasa Raya.
- Mubyarto. 1984. *Strategi Pembangunan Pedesaan*. P3PK UGM : Yogyakarta.
- Muhadjir, Neong. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Nasution. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Pohan, Rusdi. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendidikan*. Yogyakarta : Tanarka.
- Ritzer Georger. 1992. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sastrosupono. 1984. *Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat Indonesia*. Bandung : Rosda Karya.
- Siagian, Sondang., P. 1972. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Penerbit Gunung Agung.
- Soelaiman. 1994. *Pendidikan Dalam Keluarga*. Bandung : Alfabeta.
- Soetrisno, Lukman. 2001. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Sujana, Djuju. 1996. *Peranan Keluarga Dalam Lingkungan Masyarakat*. Bandung : Rosda Karya.

- Suparlan, Parsudi. 1993. *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan Perspektif Antropologi*. Jakarta : UI.
- Surya, Moh. 2004. *Pokok-pokok Pengelolaan Pendidikan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Syam, M. Noor. 1986. *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat, Pendidikan Pancasila*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Tikson, Deddy. 2009. *Partisipasi Masyarakat dalam Manajemen Perkotaan*. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia. No 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Usman, Sunyoto. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Welisa. 1992. *Partisipasi Jasa Terminal Bus Lintas Andalas Padang dalam Pelaksanaan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban ( K3 )*. Skripsi Unand.
- William, J. Goode. 1995. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Bumi Aksara.
- [www.gn-ota.or.id](http://www.gn-ota.or.id). *Pengertian – GN-OTA Online*. Diakses 22 Januari 2010.
- [www.Anne.ahira.com](http://www.Anne.ahira.com). *Pengertian Sekolah*. Diakses 01 Desember 2010.
- [www.jugaguru.com.standar](http://www.jugaguru.com.standar) . *Proses Pendidikan Kesetaraan*. Diakses 15 april 2011.